

PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Studi pada BKM Kelurahan Terondol, Serang-Banten

Ilham Akbar

Program Diploma IPB

email: akbaril.xa3@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menuliskan peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang – Banten. Berbagai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh BKM Kelurahan Terondol melalui perencanaan jangka menengah tiga tahun dengan tiga program utama, yakni Program Asistensi Sosial dan Jaminan Sosial, berupa perbaikan prasarana lingkungan kumuh dan perbaikan rumah perumahan orang miskin. Program Pemberdayaan Sosial, berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin secara kelompok. Program Peningkatan Ekonomi Mikro dan Menengah, berupa pemberian kredit usaha rakyat dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kesimpulannya, program penanggulangan kemiskinan untuk kesejahteraan sosial di perkotaan, merupakan program pemerintah yang melibatkan secara langsung masyarakat di tingkat kelurahan sebagai sasaran program. Fungsi BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tahap identifikasi kebutuhan, pelaksanaan perumusan masalah, perencanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, yang menghasilkan program pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang-Banten, melalui program asistensi sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan program peningkatan ekonomi mikro dan menengah bagi kelompok swadaya masyarakat.

Kata kunci: Pembangunan, kesejahteraan sosial & BKM.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia dikenal istilah Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang merupakan suatu usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial atau pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun swasta, guna memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Kesejahteraan sosial itu sendiri merupakan suatu upaya untuk membantu permasalahan seorang individu, kelompok ataupun masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan individu, kelompok, ataupun masyarakat, baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan fisik (kondisi sejahtera). Dengan demikian, tujuan utama PKS diantaranya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial tentunya tidak akan berjalan mulus seperti apa yang telah direncanakan, hambatan-hambatan dengan berbagai bentuknya, sudah pasti merintangai usaha PKS terkait meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan sosial yang beragam perlu dilakukan oleh tenaga profesional yang terkait dengan bidangnya.

Dalam ilmu kesejahteraan sosial, tenaga profesional yang dimaksud adalah spesialis pekerja sosial (social worker), yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan mengenai fenomena sosial serta memiliki keahlian atau skill dibidang sosial melalui pendidikan dan pelatihan. Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas kehidupan mereka sehingga dapat berfungsi secara sosial, sebagaimana yang diungkapkan Suharto (2007: 2) bahwa upaya kesejahteraan sosial mencakup ilmu pekerjaan sosial dan melibatkan pekerja sosial (social worker) sebagai profesi utamanya.

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerja sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan

masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS).

AMA (1993) dalam Nafsiah (2014) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan dapat membantu orang, kelompok atau masyarakat yang secara sosial “terbelakang” dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat berfungsi seperti khalayak orang pada umumnya dalam kehidupan sosial. Saat ini banyak komunitas atau lembaga yang visi-nya mengarah ke pembangunan kesejahteraan sosial atau mempunyai program pemberdayaan masyarakat, baik itu lembaga pemerintah ataupun swasta.

Upaya pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah membentuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah setempat dan pihak swasta secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk menangani program tersebut, ditingkat kelurahan oleh pemerintah dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Fungsi BKM yakni untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah kemiskinan melalui program pemberdayaan dari pemerintah, agar mereka mampu melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif. BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan secara umum ditujukan untuk pembangunan masyarakat kelurahan.

BKM memiliki potensi terhadap pembangua kesejahteraan masyarakat,

karena BKM secara tidak langsung merupakan manifestasi dari masyarakat itu sendiri sehingga lebih memahami permasalahan sosial di masyarakat sekitarnya. Dengan adanya BKM sebagai lembaga masyarakat, sebagai pihak penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan, diharapkan mampu membangun modal sosial dalam suatu masyarakat agar setiap program bantuan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu BKM sebagai lembaga kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu merangkul serta mengayomi masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahannya. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, BKM sendiri membentuk Tim pelaksana untuk membantu dalam setiap kegiatan pembangunan, yakni Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh BKM Kelurahan Terondol melalui perencanaan jangka menengah tiga tahun dengan tiga program utama, yakni Program Asistensi Sosial dan Jaminan Sosial, berupa perbaikan prasarana lingkungan kumuh dan perbaikan rumah perumahan orang miskin. Program Pemberdayaan Sosial, berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat miskin secara kelompok. Program Peningkatan Ekonomi Mikro dan Menengah, berupa pemberian kredit usaha rakyat dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kerangka Konseptual

1. Pembangunan kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah suatu upaya yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto 1997). Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2. Pembangunan Nasional

Tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah negara-bangsa secara umum meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi, yang fungsinya mengacu pada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak dan lain sebagainya) guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai biaya pembangunan.
- b. Perawatan Masyarakat, yang fungsinya menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, tertimpa bencana alam dan lain sebagainya).
- c. Pengembangan Manusia, yang fungsinya mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Agar Pembangunan Nasional berjalan dengan lancar, ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara optimal, serta mampu mengatasi berbagai macam kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan secara cepat dan responsif. Namun yang lebih penting dalam pembangunan nasional di negara dunia ketiga yaitu pengembangan manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafar (2012: 41) bahwa pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya lebih diarahkan pada masyarakat dengan mengutamakan aspek kehidupan dan penghidupan¹.

3. Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial seringkali dikaitkan atau bahkan bertumpang tindih dengan bidang lainnya (overlapping), yang pada umumnya dikategorikann sebagai pembangunan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih dari itu makna sosial bahkan tidak jarang diartikan secara luas, seperti kegiatan kesukarelawanan, hiburan, rekreasi, atau sesuatu yang lainnya yang bersifat non-fisik atau non-ekonomi.

Merujuk pada definisi Kesejahteraan “Welfare” dari Howard Jones (1990) dalam Muttaqien (2011) menjelaskan tujuan utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. Makna “Kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” menekankan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya menunjuk pada “Kemiskinan fisik”, seperti rendahnya pendapatan, atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemis, termasuk didalamnya

1 Pembangunan dengan kata lain lebih mengutamakan sumberdaya insani dan menghargai segi pandang masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalahnya. Inisiatif masyarakat akan lebih dihargai dalam usaha perencanaan dan strategi pembangunan yaitu strategi menggalakkan inisiatif pembangunan dari bawah (Bottom-up) sebagai pembangunan yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan mementingkan aspek-aspek humanistik pada tingkat lokal/masyarakat yang selanjutnya lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Lihat: Syafar: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, 2012.

masalah kebodohan, keterbelakangan, serta kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Pengembangan masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerja sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Pengembangan masyarakat meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial yang berbasis masyarakat.

Menurut AMA (1993) dalam Nafsiah (2014) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan dapat membantu orang, kelompok atau masyarakat yang secara sosial “terbelakang” dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat berfungsi seperti khalayak orang pada umumnya dalam kehidupan sosial. Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, umur, dll.

Sebagaimana asal katanya, yakni pengembangan masyarakat yang terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat diterapkan terhadap pelayanan sosial kemasyarakatan.

5. Keadilan sosial

Keadilan sosial berarti pemberian hak partisipasi kepada masyarakat sosial untuk turut berperan dalam pembangunan sosial. Dalam makna tertentu keadilan sosial bagi sebagian masyarakat berarti memperoleh kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan, dan jaminan sosial lainnya. Menurut Sayyid Quthb (1983) dalam Hendri (2012: 2) menjelaskan bahwa keadilan sosial terdiri atas tiga asas, yakni kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat. Dalam Islam makna keadilan sosial dimulai dengan pembebasan jiwa, selanjutnya Islam memerangi segala bentuk diskriminasi dan menegakan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Jaminan sosial merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan jiwa yang dinikmati oleh masyarakat, beriringan dengan adanya persamaan kemanusiaan yang sempurna tanpa adanya satupun bentuk diskriminasi.

6. Pengertian dan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan, yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. Pengembangan keswadayaan masyarakat secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai, berupaya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga dengan bersama-sama, dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan kemiskinan.

BKM sebagai organisasi masyarakat ditingkat desa/kelurahan dengan berhimpun sesama warga setempat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum dan keputusan tertinggi bertumpu pada para anggota secara kolektif. Kedudukan BKM sebagai wakil masyarakat diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut kehidupannya, agar secara mandiri mampu menjalani kehidupan bermasyarakat. Tujuan BKM adalah membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat.

Adapun kriteria BKM sebagai organisasi masyarakat, yang bertumpu pada kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga yang prakarsa dalam pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri.
- b. Kekuatan atau kewenangan dan legimitasinya bersumber dari warga masyarakat setempat.
- c. Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif pada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan sebagai perwakilan masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan, dengan pengambilan keputusan tertinggi berada pada tangan anggota secara kolektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabilitas yang berakar pada lapisan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat miskin, BKM mempunyai tugas pokok, yakni Pemberdayaan Masyarakat, yaitu dengan melakukan rumusan penetapan kebijakan secara demokrasi dan partisipatif yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin, untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui P2KP dan swadaya masyarakat. BKM mampu mengorganisasi masyarakat untuk membuat perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif, melalui tahapan identifikasi masalah, perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, melaksanakan kegiatan pemecahan masalah, monitoring dan evaluasi.

Fungsi BKM dalam menjalankan kegiatannya yaitu menghidupkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat melalui modal sosial, untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berupaya membuka akses serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, keuangan yang dibawah kendali BKM, Serta Memfasilitasi jatau mempertemukan jaringan sosial dengan potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan Sosial

Pelaksanaan identifikasi masalah oleh BKM bertujuan untuk memperoleh data riil masyarakat miskin yang benar-benar layak menerima bantuan. Pelaksanaanya dimulai dari pertemuan antar warga pada tingkat RT, dalam pertemuan tersebut membicarakan atau mempelajari data dari profil kelurahan. Setelah itu BKM dapat merencanakan program penanggulangan kemiskinan dengan melihat kondisi masyarakat di Kelurahan Terondol, antara lain:

- a. Permasalahan sosial masyarakat miskin yang yang dirasa perlu diselesaikan bersama secara partisipatif, melalui program pemerintah dalam

penanggulangan kemiskinan dengan dukungan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya.

- b. Keadaan yang menyebabkan atau menimbulkan masyarakat menjadi miskin serta masalah-masalah sosial yang menjadi pendukung terjadinya kemiskinan.
- c. Tingkat kebutuhan dasar masyarakat miskin yang harus terpenuhi.
- d. Lingkungan pemukiman yang tidak layak, yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan sosial.

Proses identifikasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan warga yang diwakili oleh tiap-tiap RT dan juga dihadiri oleh masyarakat miskin. Selain itu proses identifikasi oleh BKM dilanjutkan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan masyarakat, untuk melihat lebih detail permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang sebenarnya. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh sekretaris BKM Kelurahan Terondol (IR) dalam proses wawancara “Pelaksanaan identifikasi permasalahan warga kelurahan terondol yang kami lakukan melalui dua tahapan, pertama melalui pertemuan antar warga yang masing-masing diwakili oleh RT dan juga masyarakat miskin yang memenuhi kriteria, dan yang kedua melalui pengamatan langsung untuk mengecek kebenaran data”.

Pelaksanaan identifikasi oleh BKM Kelurahan Terondol, memperoleh sejumlah usulan terkait kebutuhan masyarakat miskin yang perlu dibantu dan pembangunan prasarana lingkungan masyarakat miskin ditingkat RT dan RW, usulan tersebut diantaranya, usulan terkait kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan, yakni berdasarkan data yang diperoleh terdapat 961 jiwa masyarakat yang tergolong miskin “calon penerima bantuan”, terdiri dari:

- a. Golongan paling miskin atau fakir miskin sebanyak 134 keluarga. Kelompok masyarakat ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, pada

umumnya masyarakat golongan ini tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali, bahkan tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial yang masih menyebar dimasing-masing RT.

- b. Golongan miskin sekali sebanyak 322 keluarga. Kelompok masyarakat ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti masih memiliki sumber-sumber pendapatan, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf.
- c. Golongan rentan sebanyak 429 keluarga. Kelompok ini dikategorikan hampir bebas dari golongan masyarakat miskin, karena memiliki kehidupan yang lebih baik dari pada golongan fakir dan miskin, namun kelompok rentan (agak miskin), masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial didalamnya, sangat dikawatirkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan tersisihkan.

Selain itu hasil identifikasi juga memperoleh usulan perbaikan dan pembangunan jalan gang, mulai dari RW 01 sampai RW 06 terdiri dari 25 RT dan sebanyak 146 jalan gang. Pembuatan dan perbaikan saluran air serta saluran limbah keluarga sebanyak 74 saluran. Pembangunan jalan aspal tingkat RT/RW sebanyak 22 jalan. Pembuatan bak sampah sebanyak 5 tempat. Serta penerangan lampu jalan sebanyak 25 titik.

Perumusan Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Langkah-langkah pemecahan masalah oleh BKM, bertujuan untuk membahas masalah pokok yang dirasakan masyarakat miskin di Kelurahan Terondol, agar dapat segera dicarikan solusi serta alternatif-alternatif lain untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui program-program pemerintah dengan kegiatan masyarakat secara partisipatif.

Proses perumusan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan BKM Kelurahan Terondol, melalui pertemuan anggota BKM dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat serta didampingi oleh fasilitator kelurahan, dalam pertemuan itu dilakukan diskusi terarah untuk menentukan prioritas masalah dari hasil identifikasi yang akan dijadikan usulan kegiatan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Seperti yang dipaparkan sekretaris BKM Kelurahan terondol (IR) dalam proses wawancara, “Maksud dari pelaksanaan rembug warga dalam diskusi terarah terkait perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, yakni untuk mencari kesepakatan rencana apa yang tepat untuk program penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil dari identifikasi dan hasil temuan-temuan masalah yang dirasakan masyarakat miskin di kelurahan terondol”.

Dari berbagai masalah yang ditemukan dilapangan, dalam perumusan langkah-langkah pemecahan masalah oleh BKM serta perwakilan dari kelurahan, ditetapkan prioritas permasalahan yang dianggap tepat untuk dijadikan isu dalam program penanggulangan kemiskinan, antara lain:

- a. Program pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat miskin, berupa perbaikan sarana lingkungan, perbaikan jalan gang dan jalan utama, saluran air limbah rumah tangga, dan pembuatan bak sampah. Alasan masyarakat dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar bisa mengakses pembangunan, sehingga mempermudah mereka dalam menjalani aktifitasnya, dengan penataan lingkungan yang sehat dapat mendukung kebersihan dan kesehatan masyarakat miskin.
- b. Program pengentasan rumah kumuh keluarga miskin, berupa rehap rumah bagi warga masyarakat di kelurahan trondol yang masuk dalam kriteria:

- 1) Rumah sangat tidak layak huni
- 2) Rumah tidak layak huni
- 3) Rumah sangat sederhana

Alasan mengusulkan program ini karena perbaikan rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi bagi masyarakat miskin, kalau tidak ada bantuan sampai kapanpun mereka tidak bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman/layak, karena rumah merupakan kebutuhan utama.

c. Program pemberdayaan masyarakat miskin, melalui pelatihan kerja bagi keluarga miskin, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemberdayaan. Program tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelatihan keterampilan dalam bidang perbengkelan.
- 2) Pelatihan keterampilan dalam bidang menjahit.
- 3) Pelatihan kewirausahawan.
- 4) Pelatihan budidaya perikanan.
- 5) Pelatihan pertanian.

Masyarakat miskin perlu diberdayakan melalui keterampilan kerja, dengan mendapatkan pelatihan, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat hidup dengan mandiri.

d. Program peningkatan ekonomi mikro dan menengah melalui penyediaan modal bergulir, untuk membuka usaha bagi masyarakat miskin. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat yang sudah dibekali pelatihan kerja mampu berupaya untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Perumusan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan BKM melalui diskusi terarah yang dihadiri oleh pengurus beserta tokoh masyarakat

untuk merumuskan masalah yang ada dimasing-masing RT, pada hakekatnya untuk mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam merumuskan karakteristik dan persoalan kemiskinan yang dihadapinya.

Pelaksanaan Kegiatan Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah merupakan tahapan lanjutan dari rumusan data hasil dari identifikasi masalah/kebutuhan, menjadi materi dalam pembahasan melalui rapat anggota BKM, sebagai proses pembuatan perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis), yang setiap tahunnya harus dikaji ulang oleh BKM bersama masyarakat, tujuannya untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan masyarakat miskin yang akan mendapat pemberdayaan setiap tahunnya. Seperti yang telah dipaparkan oleh sekretaris BKM Kelurahan Terondol (IR) dalam proses wawancara “pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah/kebutuhan merupakan kegiatan yang harus dijalankan oleh BKM bersama masyarakat setiap tahunnya, melalui pendataan ulang masyarakat miskin mengenai kebutuhan dasarnya. Karena merupakan syarat yang harus terpenuhi sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah (PJM) untuk mendapatkan dana bantuan dari PNPM serta swadaya masyarakat”.

Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah masyarakat miskin kelurahan trondol, dibentuk melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimaksudkan untuk membentuk organisasi yang beranggotakan orang-orang yang bersifat sukarelawan dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Tujuan BKM membentuk KSM yakni untuk membantu mengembangkan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keberdayaan guna mengatasi berbagai permasalahan pokok yang ada di masyarakat.

Tujuan dibangunnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai langkah pemecahan, masalah/kebutuhan pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Terondol yaitu:

- a. Untuk menumbuhkan ikatan-ikatan dan solidaritas sosial, serta semangat dalam kebersamaan antar masyarakat.
- b. Untuk mendorong masyarakat agar lebih dinamis dalam mengemabangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan.
- c. Untuk mendukung dalam proses pemberdayaan agar berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah pembelajaran atau interaksi antar anggota untuk menggerakan keswadayaan dan membangun modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraanya.

Proses kegiatan pemecahan masalah/kebutuhan oleh BKM dilakukan dengan melalui pemberian informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang akan diberdayakan, dengan dibentuknya kelompok swadaya masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari semua unsur masyarakat dimasing-masing RT/RW akan membantu kerja BKM dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan oleh BKM bersama masyarakat, yaitu:

- a. Teridentifikasinya jenis-jenis usulan kegiatan masyarakat miskin yang berdasarkan pada potensi yang dimiliki masyarakat, serta kebutuhan riil masyarakat.
- b. Teridentifikasinya rencana program penanggulangan kemiskinan oleh panitia pelaksana kegiatan yang disebut kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat melalui APBD dan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah melalui tiga program utama, pertama perencanaan program asistensi sosial dan bantuan sosial melalui bantuan pembangunan dan perbaikan rumah keluarga miskin, bantuan pembangunan dan perbaikan prasarana lingkungan. Kedua, rencana program pemberdayaan sosial melalui pelatihan keterampilan. Dan yang ketiga, rencana program bantuan peningkatan usaha mikro dan menengah berupa penyedia modal bergulir secara kelompok.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan anggota BKM untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dikelola secara benar, sesuai usulan kegiatan dan penggunaan dana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Monitoring merupakan salah satu kegiatan BKM untuk memantau kegiatan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Akegiatan monitoring oleh BKM diantaranya meliputi:

- a. Pendampingan dalam membuat rencana usulan kegiatan
- b. Penilaian kelayakan kegiatan
- c. Penetapan prioritas usulan kegiatan
- d. Penyaluran dana bantuan
- e. Pendampingan pelaksanaan kegiatan

Evaluasi dilakukan sebagai fungsi kontrol BKM terhadap usulan-usulan kegiatan yang sudah dijalankan masyarakat melalui pendanaan APBD dan swadaya masyarakat. Evaluasi BKM dimaksudkan untuk membuat penilaian terhadap tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh masyarakat dimasing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk monitoring dan evaluasi pada program pengkulangan kemiskinan di kelurahan Trondol, BKM melakukannya pada program peningkatan ekonomi mikro dan menengah yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Sedangkan program pembangunan infrastruktur yang sifatnya penunjang bagi kegiatan masyarakat miskin, dilaksanakan monitoring dan evaluasi hanya pada saat dimulainya masyarakat membuat usulan kegiatan, perencanaan kegiatan, proses pengerjaan pembangunan, dan sampai selesainya pekerjaan pembangunan.

Tujuan dari fungsi BKM dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung masyarakat, yaitu agar mendorong tumbuhkembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya, guna mencegah munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kegiatan, serta mengupayakan agar dapat secara cepat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan, serta sebagai proses pembelajaran masyarakat dan memberikan peran terhadap masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulungan kemiskinan.

Selanjutnya, setelah dilakukan kajian terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Terondol, diperoleh data terkait peran BKM Kelurahan Terondol dalam penanggulungan kemiskinan yang terdiri dari 1) Pengidentifikasi masalah/kebutuhan terkait permasalahan masyarakat miskin di Kelurahan Terondol, sehingga terhimpunnya data-data mengenai permasalahan sosial masyarakat. 2) Sebagai perumusan langkah-langkah pemecahan masalah sehingga ditemukannya jawaban atau solusi untuk mengangkat permasalahan sosial masyarakat di Kelurahan Terondol terkait kemiskinan. 3) Sebagai pelaksana kegiatan pemecahan masalah atau pembangunan program penanggulungan kemiskinan. 4) Sebagai pengawas dan pengevaluasi dari mulai perencanaan program penanggulungan sampai kegiatan pembangunan program penanggulungan kemiskinan.

Kelebihan pada tahapan identifikasi yang dilaksanakan oleh BKM di Kelurahan Terondol, yakni diperolehnya data untuk perencanaan dengan cepat, karena BKM bersama masyarakat cukup dengan mengadakan pertemuan warga untuk mengusulkan permasalahan atau kebutuhan masyarakat, mendata masyarakat sebagai relawan, serta mendata potensi kelurahan yang digunakan untuk membantu program penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan pada tahapan identifikasi yang dilakukan BKM di Kelurahan Terondol tahapannya kurang partisipatif, karena kurang melibatkan masyarakat secara langsung yang akan diberdayakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan program pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya dimulai dari penggalan aspirasi masyarakat miskin, agar mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Kelemahan tahapan identifikasi yang tidak partisipatif menjadikan pemberdayaan masyarakat terhambat, program yang direncanakan tidak tersalurkan sesuai dengan usulan masyarakat.

Pada tahapan perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, BKM bersama masyarakat menjadi relawan, perumus dan penyusun rencana program bersama-sama, menyusun pola langkah-langkah pemecahan masalah secara menyeluruh. Pembahasan tersebut menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi serta prosedur yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah.

Suatu rumusan pemecahan masalah biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dalam bentuk-bentuk kegiatan yang jelas. Penyusunan program biasanya biasanya dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada satu pencapaian tujuan.

Ada beberapa hal yang tidak dilakukan BKM dalam perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, diantaranya:

- a. Identifikasi program, sebelum program yang akan dilaksanakan dipilih, ada baiknya program tersebut diidentifikasi terlebih dahulu, dan identifikasi beberapa program alternatif untuk dijadikan bandingan.
- b. Identifikasi hasil atau dampak dari program yang akan diambil, ini perlu dilakukan agar program yang akan diambil adalah program yang terbaik yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Penentuan biaya, yang mencakup keseluruhan biaya program. Penentuan biaya ini sangat penting dan berpengaruh terhadap program yang akan dijalankan. Jika biaya program pembangunan ditentukan dengan jelas maka dapat dihindari mengenai penyalahgunaan dana.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, BKM membentuk Tim pelaksana yakni kelompok swadaya masyarakat (KSM). Dalam pembentukannya bukan melalui pemilihan umum secara demokrasi, melainkan dengan cara pemilihan langsung oleh BKM yang hanya menunjuk orang-orang tertentu. Sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik.

Kelompok sawadaya masyarakat sebagai panitia kegiatan pembangunan seharusnya melibatkan orang-orang yang ahli pada bidang-bidangnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tugas BKM dalam memonitoring dan mengevaluasi pada praktisnya tidak berjalan dengan sepenuhnya, karena adanya kurang pemahaman secara penuh oleh anggota BKM terkait tugas dan perannya. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan terhadap anggota BKM agar lebih berkembang lagi menangani program-program berikutnya.

C. KESIMPULAN

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, merupakan program pemerintah yang melibatkan secara langsung masyarakat di tingkat kelurahan sebagai sasaran program. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan tahapan-tahapan yang dimulai dari sosialisasi program pada masyarakat melalui rembug warga, pembentukan badan pengurus (BKM), perencanaan tahapan program dimulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah, perencanaan pengawasan dan evaluasi.

Fungsi BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tahap identifikasi kebutuhan, pelaksanaan perumusan masalah, perencanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, yang menghasilkan program pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang-Banten, melalui program asistensi sosial dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan program peningkatan ekonomi mikro dan menengah bagi kelompok swadaya masyarakat.

Kelebihan pada tahapan identifikasi yang dilaksanakan oleh BKM di Kelurahan Terondol, yakni diperolehnya data untuk perencanaan dengan cepat, karena BKM bersama masyarakat cukup dengan mengadakan pertemuan warga untuk mengusulkan permasalahan atau kebutuhan masyarakat, mendata masyarakat sebagai relawan, serta mendata potensi kelurahan yang digunakan untuk membantu program penanggulangan kemiskinan.

Kelemahan pada tahapan identifikasi yang dilakukan BKM di Kelurahan Terondol tahapannya kurang partisipatif, karena kurang melibatkan masyarakat secara langsung yang akan diberdayakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan program pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya dimulai dari penggalan aspirasi masyarakat miskin, agar mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan

keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Kelemahan tahapan identifikasi yang tidak partisipatif menjadikan pemberdayaan masyarakat terhambat, karena program-program yang direncanakan tidak tersalurkan sesuai dengan keinginan dan usulan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendri. 2012. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb." UIN Sultan Syarif Kasim. Retrieved (http://repository.uin-suska.ac.id/9546/1/2012_201207AF.pdf).
- Muttaqien, Shadeq. 2011. "Pembangunan Sosial Di Indonesia." Retrieved (<http://shadeqmuttaqien.blogspot.co.id/2011/01/pembangunan-sosial-di-indonesia.html>).
- Nafsiah, Lu'lu. 2014. "Pengembangan Masyarakat (Community Development)." 1-8. Retrieved (<https://luluhatta.wordpress.com/2014/10/13/pengembangan-masyarakat-community-development/>).
- Suharto, Edi. 2007. *Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta. Retrieved ([http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/UINYogyaParadigmaKesos.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UINYogyaParadigmaKesos.pdf)).
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Syafar, Muhammad. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro Pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor - Jawa Barat)." Universitas Indonesia. Retrieved ([lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307184-T31166-Pemberdayaan masyarakat.pdf](lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307184-T31166-Pemberdayaan%20masyarakat.pdf)).